

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA PEMERINTAH

Umar Basni

Oemarbarni69@gmail.com

Sutjipto Ngumar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out how the preparation of budget and what sort of barriers that are encountered by the Surabaya city government in the preparation of budget. This research is qualitative research approach. The analysis is the local financial performance analysis which is carried out by there venue variance analysis, the degree of the decentralization, the local financial dependency ratios, analysis of variance expenditure, the expenditure efficiency ratio, and financing analysis. In this research, the significant barriers in all existing employment programs at the Revenue Offices of Surabaya city have not been found yet. Based on the result of the calculation and the analysis of the local financial performance, it can be concluded that the difference in budget revenue has negative balance, it indicates that revenue performance is quite well although it cannot earn income which is compatible with the budgeted amount. The regional financial dependency ratio indicates that the Surabaya city government in carrying out its activities does not rely on the central government/province. The analysis of variance shows that difference of expenditure budget has negative balance which indicates that there is an efficiency or budget savings. The financing analysis shows that the SILPA has negative balances the Surabaya city government is appropriate in preparing budget plan or in other words the realization of SILPA does not exceed from what that has already been set in the budget.

Keywords : Local government budget, financial performance, effectiveness, efficiency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dan hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah adalah dengan analisis varians pendapatan, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, analisis varians belanja, rasio efisiensi belanja, dan analisis pembiayaan. Dalam penelitian ini, belum ditemukan hambatan yang berarti dalam semua program kerja yang ada pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kinerja keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa selisih anggaran pendapatan bersaldo negatif, hal ini mengindikasikan kinerja pendapatan cukup baik walaupun masih belum mampu memperoleh pendapatan yang sesuai dengan jumlah yang dianggarkan. Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah kota surabaya dalam melaksanakan kegiatannya tidak bergantung pada pemerintah pusat atau propinsi. Analisis varians belanja menunjukkan bahwa selisih anggaran belanja bersaldo negatif yang mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran. Analisis pembiayaan menunjukkan bahwa SILPA bersaldo negatif sehingga pemerintah kota surabaya sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran atau dengan kata lain realisasi SILPA tidak melebihi dari yang sudah di anggarakan.

Kata kunci: APBD, kinerja keuangan, efektifitas, efisiensi

PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh pada tidak atau berkembangnya suatu

daerah tersebut. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib mempublikasikan setiap laporan keuangan daerah kemasayarakat. Laporan keuangan yang wajib dipublikasikan adalah neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Namun untuk melihat efisiensi, dan efektifitas (*value of money*) dari pemerintah daerah, maka kita dapat melihat kinerjanya melalui laporan realisasi anggaran.

Laporan Realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*back-bone*) penyelenggaraan pemerintah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah tersebut, dan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran berperan penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu, laporan realisasi anggaran publik adalah alat yang sangat penting untuk alat mempertanggung jawaban keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntasiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang mengatur jalannya pemerintahan di Surabaya, sebagai sektor publik pemerintah kota Surabaya harus menyediakan layanan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga Surabaya, termasuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dan menggunakan hasil dari pengelolaan tersebut untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan pembangunan kota Surabaya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan (Irafahmi, 2009). Pemerintah kota Surabaya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Surabaya termasuk daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dan terdesentralisasi. Oleh karena itu, adanya desentralisasi pada pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah harus menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja serta dilakukan secara tertib, taat pada peraturan dan bertanggung jawab (Asmoko, 2006).

Pemerintah kota Surabaya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membawahi bidang - bidang tertentu. Salah satunya adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) kota Surabaya. DPPK disertai tugas oleh pemerintah kota Surabaya untuk melaksanakan sebgai urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008). Salah satu fungsi dari DPPK kota Surabaya adalah perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu DPPK kota Surabaya bertugas untuk mengelola keuangan daerah dan memaksimalkan Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain - lain yang sah.

Menurut Ronald dan Sarmiyatiningsih (2010). untuk melihat kemampuan instansi menjalankan otonominya, dapat diukur melalui efektivitas dan efisiensi kinerjanya. Kinerja merupakan Suatu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi

tujuan dan sasarannya (Rasul, 2008). Kinerja juga merupakan Suatu gambaran keberhasilan atau kegagalan melaksanakan fungsi dan tugas pokok instansi. DPPK sebagai SKPD yang mengelola keuangan daerah harus dinilai efektivitas dan efisiensi kinerjanya dalam mengelola keuangan dan mencapai target - target yang dicapai dalam memaksimalkan pendapatan. Efisien adalah Perbandingan antara *input* dengan *output* kegiatan, sedangkan efektif membandingkan antara *output* dan *outcome* yang dicapai (Bastian dan Indra, 2006). Pada pemerintahan, hal yang kaitannya erat dengan kinerja adalah penganggaran, karena keberhasilan dari kinerja adalah menggunakan dana yang telah dianggarkan dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Anggaran telah menggambarkan standar efektivitas dan efisiensi. Anggaran telah menggambarkan standar efektivitas karena memuat suatu anggaran yang dapat diinginkan dan standar efisiensi karena anggaran telah merinci banyaknya masukan yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan (Asmoko, 2006). Adanya proses penganggaran ini setidaknya kita dapat mengetahui dari mana sumber pendapatan, pembiayaan serta pertanggung jawabannya (Rasul, 2008).

Penganggaran berbasis kinerja pada pemerintahan merupakan cara yang tepat untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi anggaran. Anggaran kinerja yang berorientasi *input*, *output* dan *outcome* memungkinkan program yang akan disusun dan digunakan untuk mencapai hasil (*outcomes*) yang akan diinginkan. Program yang disusun berdasarkan anggaran kinerja prioritas yang berkaitan erat dengan visi, misi dan rencana strategis yang ingin dicapai. Sehingga hasil (*outcomes*) yang dicapai mencerminkan visi, misi suatu organisasi. Komponen anggaran berbasis kinerja adalah indikator kinerja, standar biaya dan pengukuran kinerja. Ketiga hal tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menilai *input*, *output* dan *outcomes* suatu program yang disusun berdasarkan kinerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Apabila efektivitas dan efisiensi kinerja telah tercapai maka akan tercipta akuntabilitas kinerja yang merupakan visi dari seluruh organisasi sektor *public*.

Dengan melihat keadaan pemerintah daerah maka penulis merasa untuk mengemukakan dan menganalisis masalah-masalah realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value of money*)? (2) Apakah hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan realisasi anggaran? Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya melalui Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2012. (2) Memahami dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Konsep Dasar Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Konsep Dasar Anggaran Belanja Daerah meliputi Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua

Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD merupakan dasar pengolahan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember. Sedangkan, menurut Bastian dan Indra (2006), APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.

Menurut Freeman dalam Nordiawan dan Hertianti (2006), Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Peran penting anggaran dalam organisasi sektor publik menurut Nordiawan dan Hertianti (2006), peranan penting anggaran dalam sektor publik berasal dari kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan. Sementara itu, menurut Mardiasmo (2005), Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Halim (2007) mengungkapkan bahwa setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan/Walikota. Dalam melaksanakan APBD, Pemerintah Daerah Menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Selain itu, penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan. Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD. (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. (3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah, menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat (18), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007, kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatannya terdiri atas:

Pajak Daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2005). Berdasarkan UU. 28 Tahun 2009, jenis pajak kabupaten atau kota terdiri atas: (1) Pajak Hotel. (2) Pajak Restoran. (3) Pajak Hiburan. (4) Pajak Reklame. (5) Pajak Penerangan Jalan. (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. (7) Pajak Parkir. (8) Pajak Air Tanah. (9) Pajak Sarang Burung Walet. (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (PP No. 66 tahun 2001 pasal 1 ayat (1) tentang Retribusi Daerah). Berdasarkan UU. 28 Tahun 2009, objek retribusi yang dipungut kabupaten atau kota terdiri atas.

Objek Retribusi Jasa Umum, pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, seperti: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan atau kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan penguburan mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengujian Kapal Perikanan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan lain-lain.

Objek Retribusi Jasa Usaha, pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, seperti: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, Villa, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyebrangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan lain-lain.

Retribusi Perizinan Tertentu, kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Setiap Daerah mempunyai hak untuk memajukan daerahnya dengan menggunakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan perusahaan daerah maupun kekayaan setiap daerah yang dimiliki. Undang-Undang mengizinkan daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi pembangunan. Kontribusi tersebut dapat berupa deviden yang dibayarkan kepada daerah atau juga dengan memanfaatkan kekayaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan daerah yang dapat mendatangkan tambahan bagi penerimaan daerah (Ardhani, 2011). Jenis pendapatan yang tergolong dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain: (1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD. (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan milik pemerintah/BUMN. (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Menilai Kinerja Pemerintah Kota Sesuai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kinerja Pemerintah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBN/APBD. Penetapan indikator kinerja pada saat penganggaran merupakan tahapan awal dari manajemen kinerja, dan merupakan tahapan yang paling penting, karena indikator kinerja pada anggaran merupakan kontrak dan komitmen tentang hasil yang akan dicapai pada satu tahun ke depan. Kesalahan penentuan indikator kinerja pada saat penganggaran akan menyebabkan kesalahan pada saat pengukuran dan evaluasi. Kaitannya dengan hal tersebut, saat ini dikembangkan Standar Analisa Belanja (SAB), Tolok Ukur Kinerja, dan Standar Biaya dalam sistem penganggaran di Indonesia.

Pengukuran Kinerja

Manajemen kinerja membutuhkan alat yang disebut pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai keberhasilan organisasi, program, dan kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mengukur kualitas barang dan jasa, membandingkan hasil kegiatan dengan target, dan menilai efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Dengan adanya pengukuran kinerja memungkinkan bagi unit kerja pemerintahan untuk memonitor kinerja dalam menghasilkan keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) terhadap masyarakat, sehingga bermanfaat untuk membantu pimpinan instansi dalam memonitor dan memperbaiki kinerja serta fokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Value For Money

Salah satu konsep yang bisa digunakan untuk menilai/mengukur kinerja adalah konsep *Value for Money*. Pengukuran kinerja *Value for Money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Ekonomi terkait dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh nilai input. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga yang lebih rendah (*spending less*), yaitu harga yang mendekati harga pasar. Organisasi harus memastikan bahwa dalam perolehan sumber daya input, seperti material, barang, dan bahan baku tidak terjadi pemborosan. Untuk memenuhi prinsip ekonomi dapat dilakukan survei harga pasar untuk mengetahui perbandingan harga sehingga organisasi bisa menentukan harga terendah suatu input dengan kualitas tertentu.

Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau output per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).

Efektivitas

Efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan.

Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome*. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dapat dikatakan *spending wisely*. Karena output yang dihasilkan pemerintah lebih banyak bersifat output yang tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasikan, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil (*outcome*) sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*). *Value for Money* menghendaki organisasi sektor publik bisa memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas tersebut secara bersama-sama. Dengan kata lain, *value for money* menghendaki pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan tingkat biaya yang lebih rendah.

Proposisi penelitian

Proposisi akan mengarahkan perhatian peneliti kepada sesuatu yang harus diselidiki dalam ruang lingkup studinya. Proposisi di samping mencerminkan isi teoritis juga menyatakan di mana harus mencari bukti yang relevan. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Proposisi Penelitian

Rumusan Masalah	Proposisi	Permasalahan
1. Apakah Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif (<i>value of money</i>)?	1. Realisasi anggaran pada Pemerintah Kota Surabaya menjadi efisien dengan menggunakan pedoman kinerja instansi pemerintah ?	1. Apakah realisasi anggaran pada Pemerintah Kota Surabaya telah berjalan sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan realisasi anggaran?	2. Kendala dalam pembuatan APBD Pemerintah Kota Surabaya sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 ?	2. Apakah hambatan APBD Pemerintah Kota Surabaya sudah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 ?

Sumber: RAP dan Belanja Daerah Kota Surabaya

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan karena penelitian yang berjudul Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan angka - angka dan perhitungan statistik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas dan menganalisis berbagai kondisi dan situasi atau fenomena realitas yang ada di masyarakat sehingga

dijadikan obyek penelitian yang menarik sebagai gambaran kondisi tersebut (Bungin, 2007). Studi kasus adalah strategi penelitian yang cocok untuk menjawab pertanyaan 'how' atau 'why' dan peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki dan juga fokus penelitian pada fenomena tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini diawali dengan "how" dan "what", oleh karena itu penelitian ini cocok menggunakan studi kasus yang berfungsi untuk menjelaskan dan menggali lebih dalam tentang suatu peristiwa yang terjadi. Analisis dan interpretasi akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman dalam mengevaluasi penerapan terhadap anggaran kinerja yang digunakan untuk menilai kinerja pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Dengan demikian penelitian akan diawali dari fakta kemudian dilakukan observasi untuk menghasilkan simpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012) sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya berupa dokumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder: (1) Data Primer merupakan yang diperoleh langsung dari informan (subyek penelitian). Sumber data berasal dari pertanyaan disebut juga dengan informan (*person*) yang akan menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Data primer ini dapat langsung dari informan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya yaitu orang - orang yang berkaitan dengan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. (2) Data Sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan siap untuk diolah dan dapat dengan mudah diperoleh karena sudah tersedia. Data sekunder ini dalam penelitian adalah studi pustaka, dokumen - dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya. Data lain yang terkait dengan pebgukuran kinerja yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPPK Kota Surabaya dan yang terakhir data berupa Laporan Realisasi Anggaran DPPK Kota Surabaya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) *Survey* Pendahuluan, peneliti melakukan kunjungan awal pada objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya untuk mengetahui gambaran secara umum objek penelitian serta situasi, kondisi, dan permasalahan yang akan diteliti terkait dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja. (2) *Survey* Lapangan, peneliti melakukan tinjauan secara langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan melalui beberapa cara, seperti: (a) Observasi. (b) Wawancara. (c) Dokumentasi.

Satuan Kajian

Penelitian kualitatif umumnya dilakukan melalui pendekatan studi kasus. Di samping itu, pada penelitian kualitatif juga perlu menjelaskan satuan kajian (*unit of analysis*) yang merupakan satuan terkecil obyek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Peneliti dapat menentukan unit analisis yang paling sesuai dengan kebutuhan penelitian. Satuan kajian meliputi: (1) Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan. (2) Derajat desentralisasi. (3) Rasio ketergantungan keuangan daerah. (4) Analisis varians belanja. (5) Rasio efisiensi belanja. (6) Analisis pembiayaan.

Analisis Varians (selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Dalam analisis anggaran pendapatan hal utama yang perlu dilakukan oleh pengguna laporan adalah: (1) Melihat besarnya selisih

anggaran pendapatan dengan realisasinya baik secara nominal maupun persentase. (2) Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar. (3) Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan. (4) Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan.

Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Tetapi jika target pendapatan tidak tercapai, hal itu butuh penelaahan lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target.

Derajat Desentralisasi

Derajat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi kontribusi maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggara desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi. Rasio ini diumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis perbedaaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberi informasi yang sangat berarti. Hal penting yang harus diperhatikan dalam analisis varians ini adalah: (1) Mempertanyakan alasan terjadinya varians. Apakah selisih tersebut cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan? (2) Berapa besarnya varians, apakah jumlahnya signifikan atau tidak? (3) Berapa tingkat selisih (variens) yang bisa di toleran?

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini di gunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Analisis Data adalah Salah satu proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dokumentasi,

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari beberapa sumber dengan prosedur pengumpulan data yang bermacam-macam. Pengumpulan data tersebut dilakukan sampai datanya selesai. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan dan selama di lapangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang proposisi penelitian masalah dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja dalam meningkatkan efisien di Dinas Pendapatan Kota Surabaya, efisiensi dapat dinilai dari berbagai aspek diantaranya adalah: (1) Apakah realisasi anggaran pada Pemerintah Kota Surabaya telah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006? (2) Apakah hambatan APBD Pemerintah Kota Surabaya sudah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 ?

Sebab Dan Akibat Masalah

Setelah mengetahui masalah yang ada dan juga hal yang menyebabkan munculnya masalah tersebut, penulis menunjukkan sebab dari masalah yang timbul pada Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut: (1) Realisasi anggaran pada pemerintah kota surabaya akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006. (2) Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Surabaya dalam penerapan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 terletak pada pendaftaran Nomor Objek Pajak (NOP) karena belum semua yang melaporkan apabila telah merenovasi tempat tinggalnya dan dampak nya petugas sulit untuk terjun ke lapangan karena petugasnya sangat terbatas. Hal ini tercermin dari pernyataan (Kepala Seksi Anggaran Pendapatan Dinas Pendapatan Kota Surabaya) pada 2 Oktober 2014 di Kantor Dinas Pendapatan Kota Surabaya.

Akibat yang timbul dengan adanya masalah yang dihadapi oleh pemerintah kota surabaya yaitu: Kurangnya pegawai untuk pendataan Nomor Objek Pajak (NOP) mengakibatkan Dinas Pendapatan Kota Surabaya merekrut Pegawai kontrak (*outsourcing*) untuk melakukan pendataan Nomor Objek Pajak karena kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu juga mengakibatkan kenaikan pengeluaran biaya gaji karyawan untuk pegawai kontrak (*outsourcing*).

Analisis Masalah

Dalam penelitian yang penulis lakukan tentang Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran digunakan sebagai perbandingan tingkat efisiensi kinerja pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya dari tahun 2012 sampai dengan 2013. Untuk menilai efisiensi laporan realisasi anggaran menggunakan analisis varians dan rasio keuangan sebagai berikut: (1) Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan. (2) Derajat Desentralisasi. (3) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. (4) Analisis Varians Belanja. (5) Rasio Efisiensi Belanja. (6) Analisis Pembiayaan.

Pemecahan Masalah

Pencapaian efisiensi yang dinilai melalui Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Berdasarkan laporan realisasi anggaran diatas, pada tahun 2012 secara umum terdapat selisih anggaran pendapatan dengan realisasi yang bersaldo negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan yang cukup baik walaupun masih belum mampu memperoleh pendapatan yang sesuai dengan jumlah yang di anggarkan. Selisih anggaran pendapatan yang dapat terrealisasikan pada tahun 2012 sebesar Rp. 212.654.177.014 atau sebesar 94,65% dari total APBD. Meskipun secara nominal cukup besar, tetapi jika secara persentasi cukup signifikan, maka dapat dikatakan kinerjanya baik dan memiliki tingkat efektifitas yang cukup baik. Hal ini terlihat dari perbandingan realisasi penerimaan pendapatan dengan target penerimaan pendapatan sebesar 94,65%. Dan pada tahun 2013 secara umum terdapat selisih anggaran pendapatan dengan realisasi yang bersaldo negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan yang cukup baik walaupun masih belum mampu memperoleh pendapatan yang sesuai dengan jumlah yang di anggarkan. Selisih anggaran pendapatan yang dapat terrealisasikan pada tahun 2013 sebesar Rp. 59.059.610.410,39 atau sebesar 98,74% dari total APBD. Meskipun secara nominal cukup besar, tetapi jika secara persentasi cukup signifikan, maka dapat dikatakan kinerjanya baik dan memiliki tingkat efektifitas yang cukup baik. Hal ini terlihat dari perbandingan realisasi penerimaan pendapatan dengan target penerimaan pendapatan sebesar 98,74%.

Derajat Desentralisasi

Berdasarkan hasil dari perhitungan dari Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012-2013, maka Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2012-2013, yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Rasio Derajat Desentralisasi APBD Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2012-2013 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi
2012	1.886.514.301.581	3.759.034.427.311	50,19%
2013	2.279.613.848.833	4.634.301.938.654	49,19%

Sumber: RAP dan Belanja Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 1, rasio derajat desentralisasi pada tahun 2012 sebesar 50,19% dengan kriteria sangat baik dan pada tahun 2013 sebesar 49,19% dengan kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kota surabaya untuk menggali dan mengelola sangat baik, serta sangat baik pula kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil dari perhitungan dari Data Realisasi Penerimaan Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012-2013, maka Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2012-2013 yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Rasio Ketergantungan Keuangan Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2012-2013 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah
2012	1.871.795.125.730	3.759.034.427.311
2013	2.354.670.621.821	4.634.301.938.654

Sumber: RAP dan Belanja Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 2, rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2012 sebesar 49,79% dan tahun 2013 sebesar 50,81%. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa pada 2012 sampai dengan 2013 pemerintah kota surabaya dalam melaksanakan kegiatannya tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat/propinsi. Hal ini dikarenakan jumlah pendapatan asli daerah sebanding dengan pendapatan transfernya.

Analisis varians belanja

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2012, secara umum terdapat selisih anggaran belanja bersaldo negatif. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran. Anggaran belanja terserap 72,25%, penghematan anggaran belanja yang dilakukan dalam tahun 2012 sebesar 1.441.391.797.836,20 atau 27,75% dari total APBD. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari persentasenya memang tidak begitu besar, namun jika dilihat dari nominalnya cukup signifikan dan dapat dikatakan pemerintah kota surabaya memiliki kinerja yang cukup baik dalam penghematan anggaran belanja. Hal ini cukup berbeda pada laporan realisasi anggaran tahun 2013. Pada tahun ini persentasi efisiensi atau penghematan anggaran cukup meningkat sebesar 83,34%. Penghematan belanja pada tahun 2013 sebesar 859.114.607.578,37 atau 16,66% dari total APBD. Dalam analisis ini hendaknya tidak terpaku pada persentase penghematan yang berhasil dilakukan tetapi juga jumlah nominalnya. Meskipun secara persentase kecil, tetapi jika secara cukup signifikan, maka dapat dikatakan kinerjanya baik.

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat *absolute*, tetapi *relative*. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah lebih efisien dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. Rasio efisiensi belanja yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2012-2013 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah
2012	3.753.710.413.891	5.195.102.211.727
2013	4.299.150.223.081	5.158.264.830.659

Sumber: RAP dan Belanja Daerah Kota Surabaya

Dari Tabel 3, dapat diketahui bahwa rasio efisiensi belanja tahun 2012 sebesar 72% hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun ini pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran belanja sedangkan rasio efisiensi belanja tahun 2013 sebesar 83%. Hal ini dikarenakan selisih

anggaran dan realisasi belanja tidak jauh berbeda. Kinerja pemerintah dinilai baik karena rasio belanja kurang dari 100% atau realisasi lebih kecil daripada anggaran.

Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan perbandingan antara sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dari tahun ke tahun, semakin besar SiLPA menunjukkan indikator kurang tepatnya penyajian suatu anggaran. SiLPA kota surabaya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat dari Tabel 4.

Tabel 4
Perbandingan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)
Kota Surabaya 2012-2013 (Dalam Rupiah)

Tahun	SILPA	Naik/Turun
2012	502.999.263.251	-
2013	805.419.392.938	302.420.129.687

Sumber: RAP dan Belanja Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan laporan realisasi anggaran, kinerja pemerintah kota surabaya secara umum sudah cukup baik terlihat dari SiLPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah kota surabaya sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran atau dengan kata lain realisasi SiLPA tidak melebihi dari yang sudah di anggarkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya melalui Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2013, serta memahami dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. (2) Dalam penulisan penelitian ini, sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan survey pendahuluan dan survey lapangan. Sebagaimana survey pendahuluan adalah melakukan suatu kunjungan awal pada obyek penelitian untuk mengetahui gambaran umum perusahaan serta situasi, kondisi, dan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan survey lapangan adalah melakukan tinjauan langsung pada perusahaan guna memperoleh data-data yang diperlukan dengan melakukan pengumpulan data melalui beberapa cara, seperti wawancara dan dokumentasi. (3) Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dan benar agar pihak lain lebih memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data tersebut. (4) Pemerintah Kota Surabaya dalam menyajikan penerapan anggaran sudah mengacu dengan pedoman peraturan menteri dalam negeri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Surabaya dari tahun 2012 sampai dengan 2013 dalam menyajikan penyusunan anggaran sudah efisien dilihat dari: (1) Analisis varians pendapatan pada tahun 2012 sampai dengan 2013, terdapat selisih anggaran pendapatan dengan realisasi yang bersaldo negatif sehingga mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan yang cukup baik walaupun masih belum mampu memperoleh pendapatan yang sesuai dengan jumlah yang di anggarkan. (2) Derajat desentralisasi pada tahun 2012 sebesar sebesar 50,19% dengan kriteria sangat baik dan pada

tahun 2013 sebesar 49,19% dengan kriteria baik, sehingga menunjukkan bahwa kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kota Surabaya untuk menggali dan mengelola sangat baik, serta sangat baik pula kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. (3) Rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2012 sebesar 49,79% dan tahun 2013 sebesar 50,81%. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa pada 2012 sampai dengan 2013 pemerintah kota Surabaya dalam melaksanakan kegiatannya tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat/propinsi. Hal ini dikarenakan jumlah pendapatan asli daerah sebanding dengan pendapatan transfernya. (4) Analisis varians belanja pada tahun 2012 sampai dengan 2013, terdapat selisih anggaran yang bersaldo negatif sehingga mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran. (5) Rasio efisiensi belanja tahun 2012 sebesar 72% hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun ini pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran belanja sedangkan rasio efisiensi belanja tahun 2013 sebesar 83%. Hal ini dikarenakan selisih anggaran dan realisasi belanja tidak jauh berbeda. Kinerja pemerintah dinilai baik karena rasio belanja kurang dari 100% atau realisasi lebih kecil daripada anggaran. (6) Analisis pembiayaan, kinerja pemerintah kota Surabaya secara umum sudah cukup baik terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah kota Surabaya sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran atau dengan kata lain realisasi SILPA tidak melebihi dari yang sudah di anggarkan. (7) Hambatan dalam penyusunan anggaran selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 tidak mengalami hambatan yang berarti. (8) Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Surabaya dalam penerapan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 terletak pada pendaftaran Nomor Objek Pajak (NOP) karena belum semua yang melaporkan apabila telah merenovasi tempat tinggalnya dan dampaknya petugas sulit untuk terjun ke lapangan karena petugasnya sangat terbatas.

Saran

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disarankan beberapa hal yang diharapkan sebagai berikut: (1) Diharapkan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyusunan anggaran pada periode-periode mendatang lebih dimatangkan lagi sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. (2) Diharapkan didalam pencapaian output maupun outcome lebih ditingkatkan lagi sehingga dalam mencapai tujuan organisasi akan lebih meningkat dari tahun ke tahun. (3) Didalam pengalokasian penerapan anggaran dari tahun ke tahun ditekan seminimal mungkin, dan dengan realisasi yang lebih kecil dibandingkan dengan anggaran. Sehingga diharapkan didalam anggaran untuk tahun mendatang bias lebih minimal juga seperti realisasi dari tahun sebelumnya. (4) Pada penelitian yang akan datang disarankan untuk mengavaluasi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan proses pembangunan. Perlu diteliti pula komitmen kepala daerah dan/atau DPRD dalam perencanaan dan implementasi APBD. (5) Perlu diteliti secara khusus program kegiatan dalam rangka untuk mencapai target yang dilaksanakan secara lintas SKPD, serta perlunya *system* koordinasi dan penambahan pegawai di Pemerintahan Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, M. 2008. Analisis Pemerintah Dan Kaitannya Dengan Perekonomian Daerah Di Kabupaten Sarolangun. *Skripsi*. Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Anggraini dan Puranto. *Anggaran Berbasis Kinerja*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Ardhani, 2011. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Ariana, H. dkk, 2012. Analisis Pendapatan Dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Asmoko, H. 2006. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2: 53-64.
- Azhar. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah*.
- Bastian dan Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Airlangga. Jakarta.
- Bungin, B. M. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media. Jakarta.
- Depkeu RI dan Bappenas. 2009. *Buku 2: Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)*. Jakarta: Departemen Keuangan RI.
- Halim, 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat. Jakarta.
- Irafahmi, D. T. 2009. Studi Komparasi Pengukuran Kinerja Finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dan Blitar. *Modernisasi* 5 (2): 82-91.
- Kurniati, S. 2012. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008*.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marizka, A. 2009. *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan*.
- Munandar, M. 2001. *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Nordiawan, D. dan A. Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Puspitasari, A. F. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011*.
- Rasul, S. 2008. Akuntabilitas Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi* XII (3): 324-338.
- Republik Indonesia. 2002. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2003. Undang - Undang Republik Indonesia Pasal 3 ayat 4 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- _____. 2005. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3 tentang Penyusunan APBD
- _____. 2008. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- _____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- _____. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

- _____. 2012. *Penyusunan Renja SKPD*. Aceh: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Aceh.
- Ronald, A. dan D. Sarmiyatingsih. 2010. Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo. *Efektif Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 1 (1): 95-42.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Afabeta. Bandung.
- Sumpeno, W. 2012. *Penyusunan Renstra SKPD*. Aceh: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Aceh.
- Suprasto, B. 2006. Peluang dan Tantangan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. *Buletin Studi Ekonomi* 11 (13): 270-281.
- Wenny, C. A. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. Medan.